

Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Ekonomi di Desa Gunturmekar Kabupaten Sumedang

Institutional Revitalization of Village-Owned Enterprises Through Community Empowerment in Efforts to Strengthen the Economy in Gunturmekar Village, Sumedang Regency

Idah Wahidah ^{1*}

Devi Eryanti ²

Muhamad Alif Haikal ¹

¹Department of Political Science, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Department of Islamic Guidance and Counseling, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

email: iddah@uinsgd.ac.id

Kata Kunci

Bumdes
Pemberdayaan Masyarakat
Revitalisasi Kelembagaan

Keywords:

Bumdes
Community empowerment
Institutional Revitalization

Received: May 2024

Accepted: December 2024

Published: April 2025

Abstrak

Keberadaan BUM Des di Desa Gunturmekar masih belum menjadi perhatian para perangkat desa untuk dimanfaatkan dalam meningkatkan pendapatan desa, selain itu juga keberadaan destinasi wisata masih dikelola oleh pihak ketiga yang sangat membuka kemungkinan untuk bisa disinergikan. Melalui pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, demonstrasi, dan bimbingan secara intensif dan kerjasama dengan mitra yaitu DPMD untuk melakukan pendampingan terhadap BUM Des dan membangun pemahaman masyarakat agar ikut mengambil peran sebagai subjek dalam pengembangan BUM Des dan menjadikan destinasi wisata sebagai salah satu unit usaha. Setelah dilakukannya pendampingan, saat ini unit usaha BUM Des memiliki unit usaha baru yaitu desa wisata dan memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan desa.

Abstract

The existence of BUMDes in Gunturmekar Village is still not a concern for village officials to be used to increase village income, apart from that, the existence of tourist destinations is still managed by third parties which opens up the possibility of synergy. Through community service carried out using lecture methods, demonstrations, and intensive guidance and collaboration with partners, namely DPMD, to provide assistance to BUMDes and build community understanding so that they take part as subjects in the development of BUMDes and make tourist destinations one of the business unit. After assisting, currently, the BUMDes business unit has a new business unit, namely a tourism village, and makes a positive contribution to village income.



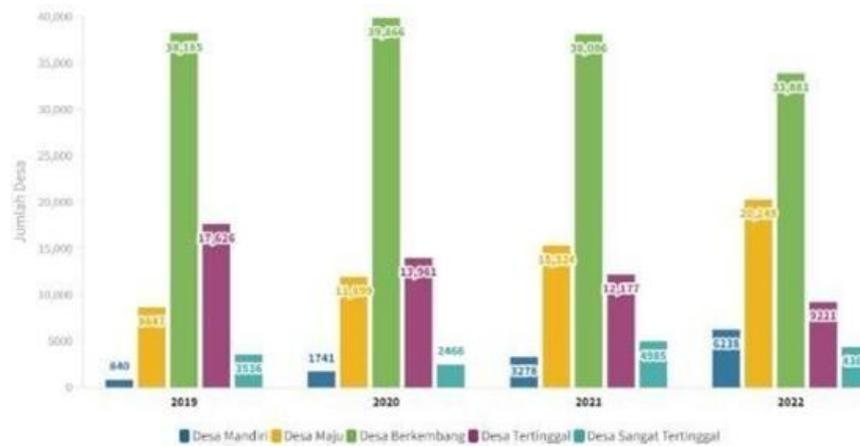
© 2025 Idah Wahidah, Devi Eryanti, Muhamad Alif Haikal. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i4.7216>

PENDAHULUAN

Harapan baru setelah lahirnya undang-undang nomor 06 tahun 2014 untuk menciptakan kemandirian Desa. Konsep kemandirian desa dipahami sebagai kewenangan yang bersifat otonom bagi pelaksanaan pembangunan desa, dalam menciptakan pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat setempat dan potensi yang dimiliki sehingga hasilnya selaras dengan harapan masyarakat dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan perekonomian. Dipahami bersama bahwa kemandirian desa dapat dilihat dari ketersediaan akses pelayanan dasar yang cukup, infrastruktur memadai, mudahnya aksesibilitas transportasi, pelayanan umum yang baik, dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Tujuan dari terciptanya desa mandiri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup dan penanggulangan kemiskinan. Pemerintah saat ini sangat mendorong setiap daerah berkomitmen untuk menciptakan desa mandiri, hal ini dilatarbelakangi oleh setiap desa harus mampu memanfaatkan potensi yang ada dan memberdayakan masyarakat dalam pembangunan juga kemandirian ekonomi masyarakat. Keterbatasan desa yang termasuk pada kategori

How to cite: Wahidah, I., Eryanti, D., Haikal, M. A. (2025). Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Penguatan Ekonomi di Desa Gunturmekar Kabupaten Sumedang. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(4), 1009-1011. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i4.7216>

desa mandiri, menjadi perhatian dan komitmen bersama. Berdasarkan laporan Indeks Desa Membangun (IDM) yang dirilis Kementerian PDRT, sebanyak 73.945 desa di Indonesia terdapat 20.249 desa dengan kategori maju. Adanya kenaikan sebesar 32.14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 2021 sebanyak 15.324 desa, dapat dilihat pada grafik berikut :



Gambar 1. Indeks Desa Membangun (IDM) Indonesia Tahun 2019-2022.

Setiap daerah di seluruh Indonesia dituntut dalam percepatan pembangunan desa, salah satunya pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui program gerakan membangun desa atau sering dikenal dengan istilah Gerbang Desa meraih penghargaan dari kementerian PDRT pada tahun 2022. Melalui Gerbang Desa pemerintah provinsi melakukan gerakan percepatan dalam mendorong desa lebih mandiri. Lahirnya Permen nomor 7 tahun 2021 tentang prioritas pembangunan dana desa tahun 2022, dipahami bahwa prioritas penggunaan dana desa diarahkan pada percepatan SDGs desa melalui pemulihan ekonomi nasional. Berdasarkan kewenangan desa, pemulihan ekonomi nasional salah satunya dapat diwujudkan dalam pengembangan BUM Des. BUM Des menjadi pilar kegiatan ekonomi desa yang berfungsi sebagai social institution dan commercial institution yang berpengaruh pada kemandirian ekonomi desa. Keberadaan BUM Des sebetulnya sudah diakui sejak tahun 2004, namun peraturan perundang-undangan lebih rinci membahas tentang BUM Des pada tahun 2014 sehingga keberadaannya saat ini tidak hanya dihitung namun diperhitungkan. Pandemi covid memberikan dampak cukup besar bagi perkembangan BUM Des, sehingga mendorong lahirnya peraturan baru yaitu adanya PP Nomor 11 tahun 2021 yang menjelaskan kembali secara rinci keberadaan BUM Des untuk bisa dioptimalkan oleh desa dalam menciptakan kemandiriannya. BUM Des merupakan badan hukum yang didirikan desa atau bersama desa-desa dalam memanfaatkan aset, mengelola usaha, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa layanan atau jenis usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat desa. Melalui PP Nomor 11 tahun 2021 menjadi landasan dalam upaya revitalisasi BUM Des, ada dua langkah yang dilakukan dalam merevitalisasi BUM Des yaitu revitalisasi usaha BUM Des dan tata kelola kelembagaan BUM Des. Revitalisasi kelembagaan BUM Des melalui perbaikan struktur organisasi, tata kerja pengurus dan program kelembagaan. Banyaknya BUM Des yang tidak berkembang pasca pandemi covid mengakibatkan BUM Des tidak lagi bisa diandalkan untuk perkembangan ekonomi. Pentingnya BUM Des dihidupkan kembali melalui upaya revitalisasi tata kelola kelembagaan, tujuannya untuk berkontribusi dalam penguatan ekonomi masyarakat desa. Untuk mengawali perbaikan berdasarkan PP Nomor 11 tahun 2021 dengan penyelenggaraan Musdes dan Perdes, BUM Des berbadan hukum serta pengelolaan operasional yang transparan dan akuntabel. Dalam pengimplementasiannya pemerintah kabupaten/ kota menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUM Des. BUM Des yang diharapkan dikelola dengan profesional untuk menjadi pendukung kesejahteraan masyarakat dan menjadi sumber penerimaan anggaran desa, namun dalam perjalanannya banyak yang tidak beroperasi bahkan keberadaannya tidak ada aktivitas usaha sama sekali. Hal ini menjadi bukti bahwa pentingnya dilakukan revitalisasi secara optimal melalui kelembagaan dengan membangun pemahaman bersama antara pengurus BUM Des, pemerintah desa dan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul strategi pengelolaan BUM Des berbasis pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Sumedang, keterlibatan masyarakat sebagai objek ataupun

subjek berkontribusi terhadap perkembangan BUM Des (Wahidah, 2023). Masyarakat lebih berdaya dalam mengoptimalkan pengetahuan dan keterampilannya dalam membangun aktivitas perekonomian desa, masyarakat menjadi bagian penggerak utama dan penerima manfaat dari keberadaan BUM Des. Pentingnya perencanaan pendirian BUM Des dengan mengkomodir aspirasi masyarakat dan mendorong keterlibatan secara aktif elemen masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumedang sudah banyak upaya yang dilakukan melalui program SiKePo BUM Desa, aplikasi ini menjadi platform baru dalam upaya revitalisasi BUM Des di Kabupaten Sumedang. Mengingat perkembangan BUM Des di Kabupaten Sumedang masih perlu diperhatikan dalam meningkatkan profit atau keuntungan, BUM Des yang tersebar masih sedikit yang menggerakkan ekonomi desa dan masih banyak BUM Des yang belum mengoptimalkan pemberdayaan masyarakatnya. BUM Des bertujuan untuk penguatan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, jika tujuan tersebut belum terealisasi dengan optimal maka perlu ada pendekatan baru. Kabupaten Sumedang sudah sangat akseleratif dalam merespon program Gerbang Desa Prov. Jawa barat melalui pengelolaan BUM Des berbasis Desa Wisata. Penelitian yang berjudul pemberdayaan ekonomi masyarakat pada objek wisata (studi deskriptif pada objek wisata Samalengoh Camp Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang), mengkonfirmasi bahwa terbentuknya kawasan wisata diinisiasi oleh karang taruna yang melibatkan masyarakat. Kawasan ini beroperasi sejak tahun 2019, masih minimnya partisipasi masyarakat dan masih kurangnya berkontribusi dalam peningkatan perekonomian bagi PADes sehingga perlu ada strategi baru dalam revitalisasi BUM Des. Berangkat dari penelitian yang sudah dilakukan dan permasalahan BUM Des di Desa Gunturmekar tersebut, maka kegiatan pengabdian akan dilakukan melalui pendampingan revitalisasi kelembagaan. Berdasarkan kajian awal bahwa Desa Gunturmekar memiliki potensi desa yang sudah dikelola dengan baik melalui program desa wisata. Namun pada aspek implementasi program, perlu ditingkatkan kembali dari sisi pengelolaannya dengan merevitalisasi kelembagaan BUM Des melalui pemberdayaan masyarakat.

METODE

Discovery (Pengkajian)

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Desa Gunturmekar, Kecamatan Tanjungkerta, Kabupaten Sumedang dianggap penting dilakukan mengingat karakteristik permasalahan BUM Des yang belum bisa memaksimalkan unit usaha melalui sektor pariwisata. Hal ini perlu ditindaklanjuti untuk segera memformulasikan pendekatan baru melalui pemberdayaan masyarakat. Masyarakat Desa Gunturmekar yang cukup baik dalam asas gotong royongnya.

Dream (Impian)

Sasaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah masyarakat desa Gunturmekar yang terdiri dari unsur RT, RW, Kader, PKK, Karang Taruna, tokoh masyarakat, masyarakat pelaku UMKM dan seluruh pengurus BUM Des sebagai aktor utama. dalam hal tindak lanjut dari pengkajian, pentingnya mengembangkan BUM Des melalui pemerdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi dengan mengoptimalkan sektor wisata yang dimiliki.

Design (Mengatur rencana perubahan)

Kegiatan pengabdian mencoba merespon beberapa masalah yang ada di BUM Des yang sudah diuraikan sebelumnya, melalui program kemitraan ditawarkan beberapa metode pendekatan yaitu sosialisasi kepada masyarakat dan pendampingan BUM Des sehingga BUM Des yang ada di desa Gunturmekar bisa memanfaatkan potensinya melalui desa wisata dan pemberdayaan masyarakat. Fokus utama pengabdian kepada masyarakat yaitu mendorong BUM Des mejadi kategori maju di Kabupaten Sumedang melalui pemanfaatan ekosistem digital dalam tata kelola kelembagaan.

Define dan Distiny (Proses akhir)

Metode dan teknik yang dilakukan dari pengabdian ini melalui beberapa kegiatan pendampingan dan pembinaan bagi masyarakat dan pengurus BUM Des. Ada tiga tahapan yang dilakukan :

1. Mengidentifikasi karakteristik masalah di desa Gunturmekar dalam mengelola potensi desa wisata melalui BUM Des melalui pemberdayaan masyarakat untuk penguatan ekonomi;
2. Membangun persepsi bersama melalui pelatihan dan pembinaan;
3. Melakukan pendampingan dalam mengembangkan kelembagaan, mendorong BUM Des termasuk kedalam kategori BUM Des maju berdasarkan parameter tata kelola kelembagaan, aturan, usaha, administrasi dan pelaporan, permodalan serta dampak ekonomi bagi masyarakat.

Untuk melaksanakan 3 (tiga) tahapan tersebut diatas, kami berupaya melakukan koordinasi dan membangun kolaborasi secara maksimal dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan beberapa stakeholder. Koordinasi dilakukan melalui pendekatan persuasive dan kolaborasi dilakukan dengan pendekatan konsep penta helix dimana peran perguruan tinggi, masyarakat, pemerintah, sektor swasta dan stakeholder lain ikut berperan dalam upaya pembangunan dan mendukung program pemerintahan. Selanjutnya untuk kegiatan pelatihan dan pembinaan, kami akan berkolaborasi dengan tenaga ahli seperti pendampingan pembuatan laporan keuangan BUM Des dan pengembangan unit usaha. Selain itu, kami akan mencoba memformulasikan skema tata kelola berbasis elektronik dalam membangun ekosistem digital dengan melibatkan pihak lain yang dapat mengerjakan pembuatan aplikasi sesuai kebutuhan BUM Des di desa Gunturmekar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Situasi BUM Des di Desa Gunturmekar Kecamatan Tanjungkerta Kabupaten Sumedang.

Keberadaan BUM Des pada hari ini cukup strategis karena desa memiliki alternatif tambahan pembiayaan domestiknya atau rumah tangga desanya, selain itu keberadaan BUM Des berpengaruh pada peningkatan sumber pendapatan masyarakat yang menghendaki keterlaksanaannya sebuah pembangunan dan peningkatan kesejahteraan secara optimal. Disini BUM Des sebagai lembaga yang seluruh atau sebagian besarnya modal dimiliki oleh desa melalui penyertaan langsung dari kekayaan desa secara terpisah guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Perkembangan BUM Des pasca adanya pandemi covid-19 berpengaruh pada kelembagaan dan unit usaha yang tidak berkembang dengan baik. Tidak sedikit BUM Des yang tidak berkembang unit usahanya sehingga BUM Des dari omset mengalami penurunan yang cukup signifikan. Ditambah lagi eranya hari ini melalui program Gerakan Membangun Desa (Gerbang Desa) diharapkan setiap desa mampu mandiri, berdaya dan memiliki kapasitas untuk perkembangan BUM Des. Kemandirian desa dapat diukur dari kemampuannya dalam melaksanakan beberapa kegiatan pemerintahan, pembangunan maupun kesejahteraan masyarakat desa. Pentingnya desa menggali potensi desa yang dimiliki agar mampu menjadikan sumber pendapatan asli desa, hal yang memperkuat melalui regulasi Undang-undang No. 6 Tahun 2014, Permendes No 4 tahun 2015, Permendagri No. 20 Tahun 2018, dan PP No 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Keberadaan BUM Des di Kabupaten Sumedang sebanyak 270 dengan kategori yang beragam, hal ini dipengaruhi oleh kelembagaan dan unit usahanya. Di Desa Gunturmekar sendiri keberadaan BUM Des selama empat tahun terakhir masih belum memberikan kontribusi maksimal dalam peningkatan PADes, karena tidak berkembangnya unit usaha BUM Des yang dimiliki. Hal ini disayangkan, jika melihat potensi yang dimiliki Desa Gunturmekar banyak potensi. Salah satu potensi yang cukup diandalkan oleh Kabupaten Sumedang salah satunya sektor wisata yang dimiliki Desa Gunturmekar yaitu destinasi wisata Samalengoh Camp. Realitanya sektor wisata Samalengoh Camp yang dimiliki tidak termasuk pada unit usaha yang dikembangkan oleh BUM Des, padahal keberadaanya sangat bisa dimanfaatkan dengan menjadikan destinasi wisata sebagai salah satu unit usaha. Problematika inilah yang mencoba peneliti terdorong untuk melakukan analisis secara mendalam dan komperhensif. Hal utama yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah memberikan pendampingan menumbuhkan kembali dan penguatan kelembagaan melalui penyusunan anggaran dasar dan atau anggaran rumah tangga, penyusunan roadmap BUM Des dalam mengali potensi desa dan pemilihan usaha BUM Des, tata kelola dan manajemen BUM Des dan pengembangan BUM Des. Profil umum BUM Des Kabupaten Sumedang berjumlah 270 dari 270 Desa dengan klasifikasi

berbeda, adapun klasifikasi ditentukan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 22 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pendirian, pengelolaan dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Des menjalankan bisnis atau social business secara sederhana yang memberikan pelayanan umum kepada masyarakat di wilayahnya untuk memperoleh keuntungan finansial. Selain BUM Des, BUM Des bersama setiap kecamatan pun cukup banyak dengan keberagaman unit usaha yang dimilikinya. Unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang sangat beragam, diantaranya kegiatan usaha di bidang penyewaan alat transportasi, perkakas atau alat pesta, gedung serbaguna untuk pertemuan atau kegiatan lain, toko, tanah milik BUM Desa dan beberapa sewaan lainnya. Selain itu, BUM Des banyak juga menjalankan usaha perantara dengan memberikan jasa layanan kepada masyarakat. Unit usaha perantaranya meliputi jasa pembayaran listrik, pasar Desa untuk memfasilitasi beberapa produk hasil karya masyarakat dan beberapa jasa pelayanan lainnya. BUM Des di Sumedang selain bisnis di bidang penyewaan dan perantara juga menjalankan bisnis yang memproduksi atau berdagang untuk kebutuhan masyarakat atau yang lingkup pasar lebih besar. Unit usaha BUM Des di Sumedang yang sudah berjalan diantaranya kegiatan perdagangan hasil pertanian, sarana produksi pertanian, dan beberapa kegiatan bisnis produktif lainnya.

Penyusunan Skema Dalam Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Melalui Proses Revitalisasi Kelembagaan BUM Des di Desa Gunturmekar, Kabupaten Sumedang.

Pada dasarnya, proses revitalisasi itu memiliki kedudukan yang sangat besar dalam keberlangsungan sebuah organisasi. Sebagai salah satu model transformasi yang sesuai dan dipilih dalam proses perubahan organisasi sesuai dengan kebutuhan dan pokok masalah dalam lembaga tentunya revitalisasi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pemahaman masyarakat. Melalui berbagai inisiatif seperti edukasi, pelatihan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, revitalisasi ini berhasil membuka pintu wawasan bagi penduduk lokal tentang peran dan manfaat BUMDes. Program edukasi menyampaikan informasi secara menyeluruh, memastikan bahwa masyarakat memahami betapa pentingnya BUMDes dalam mendukung pembangunan lokal. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan skema, tercipta rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama, yang memperkuat dukungan masyarakat terhadap keberlanjutan BUMDes. Dalam proses revitalisasi ini, transparansi dan akuntabilitas menjadi landasan, menciptakan lingkungan dimana masyarakat dapat memahami secara rinci bagaimana dana BUMDes digunakan. Dengan demikian, revitalisasi kelembagaan BUMDes tidak hanya menjadi langkah strategis untuk memajukan ekonomi lokal, tetapi juga sebuah jembatan komunikasi yang kokoh, memperkaya pemahaman dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan daerahnya.

1. Revitalisasi melalui Strategi Penentuan Unit Usaha BUM Des

Memulai dan mengembangkan bisnis atau usaha yang ada di dalam Badan Usahan Milik Desa (BUM Des) memang membutuhkan perencanaan dan keberanian tetapi juga membutuhkan perhitungan bisnis secara matang, sehingga resiko bisnis apa saja yang muncul dapat dikelola dengan baik oleh BUM Des. Salah satu cara termudah menyiapkan rencana bisnis atau menganalisis unit bisnis yang ada pada BUM Desa adalah membuat kerangka atau pondasi bisnis (building block) yang terintegrasi dengan baik. Ada sembilan pondasi bisnis yang menjadi acuan di dalam membuat rencana bisnis yang akan dikembangkan atau dijalankan BUM Des. Desa wisata saat ini menjadi andalan untuk dijadikan sebagai salah satu unit usaha BUM Des, adapun di Desa Gunturmekar destinasi wisata yang cukup diandalkan yaitu Samalengoh Camp. Adanya samalengoh camp memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Gunturmekar dari sisi pengembangan ekonomi dan berkontribusi terhadap pendapatan Desa.



Gambar 2. Contoh Brosur Samalengoh Camp.

2. Strategi Pengembangan Usaha BUM Des

Unit usaha BUM Des di Kabupaten Sumedang sudah ada, namun beberapa BUM Des masih mengalami kendala terkait pengembangan usahanya. Pentingnya keputusan-keputusan strategis dilakukan oleh setiap BUM Des menghadapin tantangan di masa yang akan datang. Pentingnya memilih kegiatan yang tepat dengan mengalokasikan sumber daya yang ada, penentuan prioritas strategi merupakan tahapan akhir untuk mengembangkan BUM Des di Kabupaten Sumedang. Pengembangan usaha bisa dilakukan dengan beberapa cara dan memanfaatkan sumber daya yang ada, adapun untuk Kabupaten Sumedang dengan keberagaman potensi alam yang dimiliki, karakteristik masyarakat dan beberapa produk karya masyarakat setempat yang memiliki nilai jual menjadi faktor yang mendukung untuk pengembangan usaha BUM Des. Banyaknya potensi alam yang dimiliki, banyak desa-desa di Kabupaten Sumedang menjadikannya destinasi wisata alam yang bertujuan untuk pengembangan ekonomi di desa tersebut. Beberapa desa juga sudah melakukan upaya untuk menjadikan desanya sebagai desa wisata berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan. Karakteristik masyarakat sumedang yang menjunjung tinggi nilai budaya menjadi keunggulan tersendiri, mengingat beberapa budaya Sumedang sudah mulai diminati oleh masyarakat, ini juga menjadi daya tarik untuk meningkatkan pengunjung dan menjadi alat marketing di beberapa destinasi wisata.



Gambar 3. Membangun Pemahaman Bersama dengan Pengurus dan Masyarakat.

Produk-produk karya masyarakat kabupaten Sumedang sudah mulai memiliki daya tarik di level regional maupun nasional, sehingga pemasarannya cukup memiliki sebaran yang cukup luas. Beberapa BUM Des sudah memanfaatkan media digital dalam pemasaran produknya, seperti *instagram*, *tiktok*, *facebook*, *web* dan ada beberapa sudah juga

bergabung dengan *GOFOOD* dan *Shopee*. Pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk membangun desa melalui BUM Des dan mengandalkan desa wisata sebagai salah satu unit usahanya.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengabdian masyarakat di Desa Gunturmekar ditujukan guna membangun persepsi bersama dengan masyarakat terkait pentingnya mengoptimalkan BUM Des yang ada untuk peningkatan ekonomi. Keberadaan wisata Samalengoh bisa dijadikan salah satu potensi yang dikembangkan dan menjadi unit usaha BUM Des yang sebelumnya belum menjadi unit usaha BUM Des, sehingga eksistensi BUM Des akan bermanfaat tidak hanya bagi pembangunan desa yang tengah dilaksanakan, tetapi juga akan berdampak kepada masyarakat desa melalui program pemberdayaan masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian ini terlaksana dengan menggunakan dana dari LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dan atas bimbingan dari reviewer. Terlaksananya pengabdian ini juga atas dukungan dari mitra kerja yaitu DPMD Kabupaten Sumedang dan pemerintahan Desa Gunturmekar Kabupaten Sumedang.

REFERENSI

- Asbeni. (2020). Strategi Pengembangan Ekonomi Desa Menuju Desa Mandiri. PATANI. <https://doi.org/10.47767/patani.v4i2.12>
- Aeni, I. N., Mahmud, A., Susilowati, N., & Prawitasari, A. B. (2021). Sinergitas Bumdes dalam Manajemen Pengelolaan Desa Wisata Menuju Pariwisata Berkelanjutan. *Abdimas*, **25**(2), 1–8. <https://doi.org/10.15294/abdimas.v25i2.33355>
- Fitrianto, H. (2016). Revitalisasi Kelembagaan BUMDes Dalam Upaya Meningkatkan Kemandirian dan Ketahanan Desa di Jawa Timur. *Jejaring Administasi Publik*. <https://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-admp95658b964ffull.pdf>
- Hanggana, S., MUrni, S., Hananto, S. T., Asrihapsari, A., Syafiqurrahman, M., Zoraifi, R., & Hantoro, S. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Kewirausahaan Dan Pemasaran Digital Pada BUM Des Blulukan Gemilang. *Kumawula : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, **4**(1), 8–14. <https://doi.org/10.24198/kumawula.v4i1.29574>
- Hasan, A., & Gusnardi. (2018). Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Desa dan Badan Usaha Milik Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Perekonomian. *Taman Karya*. <https://doi.org/10.24198/janitra.v3i2.52650>
- Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. (n.d.). <https://www.ekon.go.id/>
- Ndraha, A. B., & Uang, D. P. (2018). Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara. *Jurnal Pengembangan Pemberdayaan Pemerintah*. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i2.867>
- Prihatin, R. B., Mulyadi, M., & Suni, N. S. (2018). BUMDes dan Kesejahteraan Masyarakat Desa. Jakarta Pusat: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. https://berkas.dpr.go.id/pusaka/files/buku_tim/buku-tim-public-86.pdf
- Ridzal, N. A., & Hasan, W. A. (2020). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUM Des) Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Membangun Negeri*, **4**(1), 1–9. <https://doi.org/10.58965/jpmsipo.v1i2.11>

- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *RESONA Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 1–12. <http://dx.doi.org/10.35906/resona.v5i1.665>
- Tjiptady, B. C., Rahman, R. Z., Pradani, Y. F., Sulaiman, M., Machfuroh, T., & Saepuddin, A. (2021). Sosialisasi Peningkatan Perekonomian Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. *I-Com : Indonesian Community Journal*, 1(1), 35–40. <https://doi.org/10.33379/icom.v1i1.948>
- Wahidah, I. (2023). Strategi Pengelolaan BUM Des Berbasis Pemberdayaan Masyarakat. Widiana. <https://repository.penerbitwidina.com/publications/558879/strategi-pengelolaan-bum-desa-berbasis-pemberdayaan-masyarakat>
- Wahyudi, A. (2016). Implementasi rencana strategis badan pemberdayaan masyarakat dan desa dalam upaya pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Kotawaringin Barat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 2(2), 101–105. <https://repository.ub.ac.id/id/eprint/155576/>
- Wicaksono, Y. P., Surya, I., & Iskandar, A. (2017). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Padang Jaya Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser. *Ejurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(4), 1637–1650. [https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/Yoni%20Pramilu%20Wicaksono%20\(11-03-17-09-53-17\).pdf](https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2017/11/Yoni%20Pramilu%20Wicaksono%20(11-03-17-09-53-17).pdf)
- Wilson, M., & Wilde, P. (2003). Benchmarking community participation Developing and implementing the Active Partners benchmarks. York Publishing Services Ltd. https://books.google.co.id/books/about/Benchmarking_Community_Participation.html?id=jIHcPQAACAAJ&redir_esc=y
- Winarni, E. D. (2020). Strategi Pemberdayaan Kelembagaan Desa: Studi Kasus di Desa Nagarawangi, Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang. *Jurnal Ilmiah Perlindungan Dan Pemberdayaan*, 2(1), 1–19. <http://dx.doi.org/10.31595/lindayasos.v2i1.247>